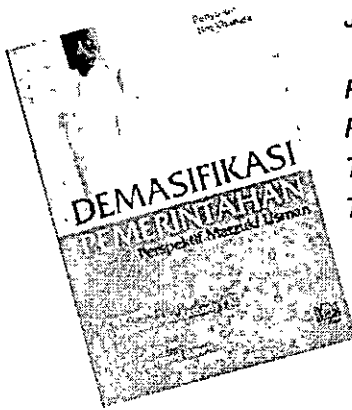


Resensi

Membangkitkan Pemikiran Marzuki Usman



Judul : Demasifikasi Pemerintahan Perspektif Marzuki Usman

Penyunting: HM. Nasruddin Anshoriy Ch.

Penerbit : Jendela Yogyakarta

Tahun : 2004

Tebal : xv + 327 halaman

Kesan pertama ketika membaca buku "Demasifikasi Pemerintahan: Perspektif Marzuki Usman" adalah bahwa buku ini mencoba memberi "bingkai" atas konsep-konsep pemikiran Marzuki Usman (MU) yang disampaikan pada berbagai forum dan media. Oleh penyunting, pemikiran-pemikiran tersebut diberi prolog, komentar, interpretasi, pelengkap, perbandingan, dan diurai serta diberi semacam konklusi dari pemikiran MU. Karena hanya memberi "bingkai" maka sulit ditemukan catatan kritis dari penyunting atas pikiran tersebut. Jadi, lebih banyak berupa dukungan dan pembenaran daripada "membedah" isinya. Lepas dari itu, apresiasi perlu diberikan ke penyunting dan penerbit buku ini, karena pola buku yang mencoba mengkonstruksikan pemikiran seseorang memang merupakan format langka dalam penerbitan buku di tanah air.

Dengan format tulisan atau buku seperti itu, menjadi tidak mudah untuk "menangkap" pikiran MU yang sesungguhnya.. Bisa jadi pengayaan isi yang dituliskan penyunting

"tertangkap" sebagai substansi pemikiran MU. Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan Revrisond Baswir dalam Pengantar buku ini, pembaca " harus bekerja ekstra hati-hati untuk memilah-milah antara pemikiran MU yang asli, yang sudah ditafsirkan, dan yang sudah diperkaya oleh tim penyusun". Untuk amannya, maka catatan yang akan saya berikan sebagian besar terbatas pada kutipan langsung (*direct citation*), dan itu pun terbatas yang terkait dengan disiplin saya, bidang ekonomi.

Memang sukar dihindarkan kesan utama membaca buku ini bahwa MU sangat terpesona dengan mekanisme pasar. Secara jelas bisa dibaca alur pikirannya yang liberal, pro globalisasi, dan meminimalkan peran pemerintah dalam perekonomian. Itulah konsep ekonomi Neo-klasik yang memang menjadi *main stream* dalam pemikiran ekonom di tanah air, dan juga global. Namun ternyata jika tidak hati-hati, dan tergesa-gesa mengambil kesimpulan, pada konklusi tersebut bisa keliru. Karena, ketika berbicara tentang BUMN ia banyak mengkritisi kegagalan pasar, sehingga mengarah ke pandangan JM Keynes yang mengundang intervensi pemerintah dalam

perekonomian. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh rezim pemerintahan yang dulu maupun sekarang. Demikian pula langkah kongkret (empat pilar) yang ditawarkan MU untuk penciptaan bagi tumbuhnya kreativitas dan tanggung jawab manajemen BUMN (169), sudah dijadikan acuan pemerintah sejak sebelum ada kementerian BUMN. Konsep tersebut sebenarnya diadopsi dari Selandia Baru (*World Bank Research Observer*, 1998) yang sukses melakukan reformasi BUMN-nya. Hanya saja konsep dan *policy* yang baik itu tidak diimplementasikan dalam suatu *action* sehingga BUMN Indonesia tetap saja tidak banyak berubah sebagai suatu "sapi perah" (*cash cow*) sebagaimana dilukiskan oleh MU sendiri.

Sayangnya contoh tentang kegagalan pasar terlalu sempit, dan tidak tersurat maupun tersirat jelas pemikiran MU mengenai berbagai kegagalan pasar (*market failure*) yang terjadi di tanah air yang dampaknya jauh lebih besar.¹ Kita bisa melihat banyak contoh mengenai kegagalan pasar tersebut: pengangguran yang luas, kemiskinan yang tinggi, ketidakmerataan, dan berbagai ketidakseimbangan lainnya dalam perekonomian. Kegagalan pasar tersebut juga bisa ditengok dibidang pariwisata, tempat MU pernah menjadi menteri: Indonesia yang kaya obyek wisata, murah, ramah, dan sebagainya, namun hanya disinggahi sekitar 5 juta wisatawan asing. Malaysia dan Thailand yang lebih "miskin" obyek wisatanya mampu menyerap 9,85 juta dan 10,67 juta (2003). Ada *imperfect information*, suatu asumsi yang tidak terpenuhi dalam suatu system mekanisme pasar bebas! Demasifikasi pemerintahan dalam arti meminimalkan campur tangan pemerintah yang sembrono bisa jadi melanggengkan kegagalan pasar dan membuat posisi kita berada dalam *status*

quo tebelit masalah-masalah klasik makro ekonomi ini. Intervensi pemerintah, melalui kebijakan fiscal, moneter, ataupun hubungan ekonomi internasionalnya, masih diperlukan untuk atasi kegagalan pasar tersebut.

Pandangan MU tentang kebijakan fiskal kiranya sangat menarik untuk didiskusikan. Ia mengingatkan agar penyusunan APBN perlu berhati-hati. "*Jangan membuat APBN di luar batas kemampuan yang sanggup dipikul oleh ekonomi*" (53). "*Indonesia tidak perlu lagi meminjamkan kepada donor country.... pembayaran cicilan pokok utang luar negeri dan bunganya akan berkurang dengan cepat sekali*" (55). Sebagaimana diketahui, fungsi kebijakan fiskal adalah sebagai alat (1) alokasi (2) distribusi, dan (3) stabilisasi. Sepanjang mengarah dan berupaya mewujudkan situasi yang sejalan dengan tiga fungsi tersebut, maka kebijakan fiskal tersebut sudah "*on the right track*". Pandangan MU yang dikutip di atas sudah sejalan dengan fungsi tersebut. APBN yang dipaksakan mengikuti pengeluaran yang diluar daya dukung ekonomi, bukan saja dapat menimbulkan pemborosan, melainkan juga beban bagi perekonomian sebagai akibat pinjaman luar negeri yang harus dibuat, ataupun penarikan pajak yang berlebihan dari masyarakat.

Namun demikian pandangan tentang subsidi BBM, "*Subsidi BBM harus dihentikan. Untuk itu perlu disosialisasikan dan dijelaskan kepada masyarakat kenapa harus dihapus....*" (54), memang perlu diperdebatkan. Subsidi BBM yang salah arah memang harus dihentikan. Orang kaya

¹ Adanya *market failure* merupakan rasionalitas absahnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Bentuk *market failure* tsb antara lain: *failure of competition, public goods, externalities, incomplete market, information failures, unemployment, inflation, and disequilibrium*.

tidak berhak memperoleh subsidi. Dikaitkan dengan fungsi alokasi dan distribusi, hal itu juga merupakan penyimpangan. Namun menghapuskan begitu saja subsidi BBM tanpa format yang jelas untuk penggantinya, juga bisa kontraproduktif. Sebelum subsidi dihapus, format baru subsidi harus jelas dulu. Fungsi *distribusi* dari kebijakan fiskal menjustifikasi adanya suatu subsidi ke masyarakat miskin. Namun kebijakan yang secara tiba-tiba menghapuskan subsidi BBM, yang berarti menarik juga subsidi dari masyarakat miskin, menjadi tidak tepat jika format kompensasi bagi si miskin belum jelas. Sosialisasi rencana kenaikan harga BBM, seperti yang terjadi sekarang, masih sangat abstrak, dan tidak memberikan jaminan kepastian bahwa masyarakat miskin tidak akan menderita dari penarikan subsidi tersebut. Ini justru bisa menjadi semacam "teror" negara atas masyarakatnya untuk menerima kebijakan publik yang "menarik kembali subsidi pada orang kaya dan miskin, namun tak jelas kompensasinya pada si miskin yang tak lagi menikmati subsidi pada komoditi tersebut".

Satu *crazy idea* (gagasan "nyeleneh") yang menurut saya "keterlaluan" adalah jalan keluar yang ditawarkan MU untuk mengendalikan pengeluaran pemerintah. Dikemukakan: "*Semua sekolah milik pemerintah dari SD sampai dengan universitas dijual pada guru-guru dan dosen dan dapat dicicil selama 40 tahun. Dengan demikian tercipta pengusaha baru pribumi di bidang pendidikan.....*". Pandangan ini sangat ekstrim, yang menempatkan pendidikan sebagai suatu komoditas. Di negara kapitalis pun, untuk kepentingan warganya, terutama untuk pendidikan dasar (*elementary* dan *secondary school*), pemerintah menempatkannya sebagai suatu barang publik. Anak-anak usia sekolah diwajibkan untuk sekolah, dengan

konsekuensi dibebaskan dari biaya-biaya. Bahkan, untuk jenjang pendidikan lebih tinggi pun pemerintah mengenai biaya lebih rendah dari biaya produksinya (Lihat: *Stiglitz, 1986, Economics of the Public Policy*). Dalam buku yang sama dikemukakan situasi di AS "*...The past thirty-five years have seen market changes in the structure of education in the United States. There has been increased federal involvement, and a larger fraction of funds are provided by the states*". Itu fakta di negara maju, yang ekonomi masyarakatnya sudah mapan. Jadi, suatu gagasan naif untuk mengkomersialkan pendidikan di Indonesia ini, terlebih untuk pendidikan dasar. Di tengah masyarakat Indonesia yang masih 40 juta hidup di bawah garis kemiskinan, lebih dari sepuluh juta sedang menganggur penuh (*open unemployment*), dapat dibayangkan betapa banyaknya masyarakat Indonesia terancam untuk tidak bisa mengenyam pendidikan jika gagasan MU diterima. Padahal, dengan situasi seperti sekarang saja, pendidikan bangsa ini sudah tertinggal, dan peringkat *indeks pembangunan manusia* (HDI) berada pada posisi di bawah rata-rata.

Saya menilai pandangan *fiscal policy* dari MU tidak berpihak kepada rakyat, seperti sarannya untuk mengkomoditikan pendidikan, dan juga gagasan hapus subsidi BBM tanpa diikuti format jelas untuk membantu si miskin. Namun ini berbeda dengan pandangannya dalam *monetary policy*, yang eksplisit berorientasi pada rakyat. Ini tercermin dari kekecewaannya atas fakta yang ada, yang melihat penyaluran dana lebih dinikmati oleh usaha skala besar. Pada subbab "Bank untuk Rakyat" (99) bisa dilihat orientasi moneter yang menggugah untuk lebih memperhatikan unit-unit usaha kecil.

Topik: Bencana Alam dan Kemanusiaan

Perhatiannya pada unit-unit ekonomi kecil juga muncul ketika mendiskusikan mengenai *agrarian reform*. Menurutnya, "kita perlu memberikan akses kepada rakyat untuk memperoleh lahan semudah perusahaan memperolehnya...." (197). Pandangan ini bukan saja menekankan tentang ketidaksetujuan MU atas kebijakan diskriminatif pada pelaku ekonomi yang besar, melainkan juga menunjukkan bahwa rakyat (kecil) itu punya kemampuan, punya potensi, asal diberi kesempatan (akses).

Yang diperlukan bukan redistribusi aset sebagaimana pernah dicanangkan tahun 1988-1989, melainkan redistribusi kesempatan (*redistribution of opportunity*).

Masih sangat banyak gagasan yang menarik yang tersimpul dari buku ini. Namun demikian, karena berbagai keterbatasan, hanya sebagian yang bisa penulis kaji dalam tulisan singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. ●

(Edy Suandi Hamid)

